

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki struktur alam yang dibentuk oleh pertemuan berbagai lempeng tektonik. Hal ini yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks, membuat banyak daerah di negara ini sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Bencana alam merupakan fenomena yang sulit dihindari dan diprediksi secara akurat. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis¹

Bencana non alam adalah peristiwa yang menyebabkan gangguan besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, namun tidak berasal dari faktor alamiah. Bencana ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor lain seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit, dan konflik sosial. Terdapat beberapa contoh bencana non alam yang sering terjadi seperti pandemi, kecelakaan industri, kebakaran besar akibat kelalaian, serta kerusuhan massal. Salah satu bencana non

¹ Dewantoro Andre, Dkk. (2021). "Implementasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Oleh BPBD Kota Semarang".

alam terbesar dalam sejarah modern adalah pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan sistem sosial di seluruh dunia.

Sedangkan bencana sosial adalah peristiwa yang timbul akibat konflik atau ketegangan dalam masyarakat yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, keamanan, dan stabilitas suatu wilayah. Misalnya bencana sosial meliputi kerusuhan massal, konflik antarkelompok, perang saudara, hingga tindakan kriminal yang meluas. Bencana ini biasanya dipicu oleh ketidakadilan, kesenjangan sosial, diskriminasi, atau provokasi yang menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Dampak dari bencana sosial sangat kompleks. Tidak hanya merusak fasilitas umum dan menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis dan memicu pengungsian besar-besaran. Selain itu, konflik berkepanjangan bisa menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Semarang sebagai ibukota dari provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan namun secara geografis, geologis, topografis dan hidrologis Kota Semarang memiliki hambatan dikarenakan terjadinya berbagai bencana alam, dengan dominasi bencana banjir dan banjir rob.

Tabel 1. 1 Potensi Luas Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Bahaya					Kelas Bahaya
		Potensi Luas Bahaya (Ha)				Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Banyumanik	17,73	8,84	3,44	30,01	Rendah	
2	Candisari	44,44	30,55	15,19	90,18	Rendah	
3	Gajah Mungkur	68,61	85,27	97,70	251,58	Tinggi	
4	Gayamsari	95,16	204,46	259,23	558,85	Tinggi	
5	Genuk	518,28	647,88	450,06	1.616,22	Sedang	
6	Gunung Pati	86,42	63,49	29,71	179,63	Rendah	
7	Mijen	10,57	3,83	0,99	15,38	Rendah	
8	Ngaliyan	231,89	142,51	60,01	434,41	Rendah	
9	Pedurungan	510,25	544,91	349,14	1.404,31	Sedang	
10	Semarang Barat	436,31	481,76	318,84	1.236,91	Sedang	
11	Semarang Selatan	109,68	170,38	125,30	405,37	Sedang	
12	Semarang Tengah	110,18	142,18	95,55	347,91	Sedang	
13	Semarang Timur	103,56	189,64	190,69	483,88	Tinggi	
14	Semarang Utara	211,70	282,34	171,10	665,14	Sedang	
15	Tembalang	330,85	295,02	375,78	1.001,64	Tinggi	
16	Tugu	646,96	739,15	831,13	2.217,24	Tinggi	
Total		3.532,60	4.032,22	3.373,85	10.938,66	Sedang	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, klasifikasi tingkat bahaya banjir diperoleh melalui perbandingan antara luas wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir dengan total luas wilayah yang terparah banjir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas bahaya yang paling dominan di Kota Semarang adalah kelas bahaya sedang. Secara spasial, Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah dengan potensi bahaya banjir terluas, yaitu sebesar 2.217,24 hektare yang termasuk dalam kategori kelas bahaya tinggi. Sebaliknya, Kecamatan Mijen memiliki luas potensi bahaya banjir

paling kecil, yakni 15,38 hektare dan tergolong dalam kelas bahaya rendah. Berdasarkan hasil analisis terhadap distribusi luas potensi dan klasifikasi tingkat bahaya pada tingkat kecamatan, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang secara keseluruhan berada dalam kategori kelas bahaya banjir sedang.

Tabel 1. 2 Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Bencana Banjir di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan(Jiwa)			Kelas Kerentanan Sosial
			Penduduk Disabilitas	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan	
1	Banyumanik	835,94	1,07	40,08	115,31	Rendah
2	Candisari	14.511,97	17,29	1.712,98	2.097,47	Rendah
3	Gajah Mungkur	19.704,34	40,86	1.455,11	2.784,18	Sedang
4	Gayamsari	67.643,81	88,52	6.314,21	8.705,73	Tinggi
5	Genuk	72.042,23	79,09	5.157,94	7.999,78	Sedang
6	Gunung Pati	4.576,81	4,41	52,79	545,77	Rendah
7	Mijen	193,74	0,25	11,68	23,48	Rendah
8	Ngaliyan	23.650,53	39,20	396,09	2.861,77	Rendah
9	Pedurungan	138.313,13	220,99	7.625,31	17.864,07	Tinggi
10	Semarang Barat	84.035,09	112,87	7.406,20	11.560,88	Sedang
11	Semarang Selatan	45.448,25	75,54	4.952,59	6.911,31	Tinggi
12	Semarang Tengah	48.785,59	72,63	4.452,92	8.077,88	Tinggi
13	Semarang Timur	63.815,91	122,93	5.702,98	10.240,19	Tinggi
14	Semarang Utara	81.958,31	90,65	8.593,53	11.204,70	Tinggi
15	Tembalang	56.393,47	94,63	3.021,11	6.605,03	Rendah
16	Tugu	30.746,57	36,40	2.572,85	3.357,34	Tinggi
Total		752.655,70	1.097,32	59.468,36	100.954,87	Sedang

Sumber: Hasil Analisis,2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan terhadap bencana banjir di Kota Semarang, tercatat bahwa total jumlah penduduk yang berpotensi terdampak banjir mencapai 752.655,70 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi adalah Kecamatan Pedurungan, dengan estimasi sebesar 138.313,13 jiwa, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpapar terendah, yakni sebesar 193,74 jiwa. Kelompok rentan dalam analisis ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penduduk penyandang disabilitas, penduduk miskin, dan kelompok umur rentan. Berdasarkan distribusi potensi kelompok rentan, Kecamatan Pedurungan juga menunjukkan angka tertinggi pada seluruh kategori, yakni 17.864,07 jiwa kelompok umur rentan, 7.625,31 jiwa penduduk miskin, serta 220,99 jiwa penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengolahan data dan klasifikasi tingkat kerentanan sosial terhadap bencana banjir, Kota Semarang termasuk dalam kategori kelas kerentanan sosial sedang.

Tabel 1. 3 Kelas Kerentanan Banjir di Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelas Kerentanan
1	Banyumanik	Rendah
2	Candisari	Rendah
3	Gajah Mungkur	Sedang
4	Gayamsari	Tinggi
5	Genuk	Sedang
6	Gunung Pati	Rendah
7	Mijen	Rendah
8	Ngaliyan	Rendah
9	Pedurungan	Sedang
10	Semarang Barat	Sedang
11	Semarang Selatan	Sedang
12	Semarang Tengah	Sedang
13	Semarang Timur	Tinggi
14	Semarang Utara	Sedang
15	Tembalang	Sedang
16	Tugu	Tinggi
Total		Sedang

Sumber: Hasil Analisis,2023

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap komponen kerentanan yang mencakup aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan, diperoleh dasar penilaian yang komprehensif untuk menentukan tingkat kerentanan Kota Semarang terhadap bencana banjir. Setiap komponen dianalisis melalui indikator-indikator yang relevan guna menggambarkan tingkat sensitivitas masyarakat, kondisi infrastruktur dan bangunan, kapasitas ekonomi, serta kualitas lingkungan dalam menghadapi potensi ancaman banjir. Integrasi keempat komponen tersebut

menghasilkan suatu indeks kerentanan yang merepresentasikan kondisi riil wilayah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan proses klasifikasi tingkat kerentanan, Kota Semarang dikategorikan dalam kelas kerentanan sedang terhadap bencana banjir. Kategori ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Semarang memiliki tingkat kerentanan yang tidak rendah, namun juga tidak berada pada tingkat yang paling tinggi, sehingga masih diperlukan upaya penguatan kapasitas, mitigasi struktural dan nonstruktural, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalkan potensi dampak yang ditimbulkan.

Adapun rincian klasifikasi tingkat kerentanan bencana banjir pada masing-masing kecamatan disajikan pada tabel sebelumnya. Variasi tingkat kerentanan antar kecamatan tersebut mencerminkan adanya perbedaan karakteristik sosial, kondisi fisik wilayah, tingkat perekonomian, serta daya dukung lingkungan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, terarah, dan berbasis kewilayahan.

Tabel 1. 4 Potensi Luas Bahaya Banjir Rob Per Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Bahaya					Kelas Bahaya
		Potensi Luas Bahaya (Ha)				Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Banyumanik	-	-	-	-	Rendah	
2	Candisari	-	-	-	-	Rendah	
3	Gajah Mungkur	-	-	-	-	Rendah	
4	Gayamsari	0,94	61,84	184,38	247,16	Tinggi	
5	Genuk	7,25	208,79	1.045,11	1.261,15	Tinggi	
6	Gunung Pati	-	-	-	-	Rendah	
7	Mijen	-	-	-	-	Rendah	
8	Ngaliyan	-	-	-	-	Rendah	
9	Pedurungan	-	0,00	0,07	0,07	Tinggi	
10	Semarang Barat	36,54	54,65	304,28	395,47	Tinggi	
11	Semarang Selatan	-	-	-	-	Rendah	
12	Semarang Tengah	61,20	39,84	9,33	110,37	Rendah	
13	Semarang Timur	14,61	153,97	208,48	377,07	Tinggi	
14	Semarang Utara	62,91	196,96	720,53	980,40	Tinggi	
15	Tembalang	-	-	-	-	Rendah	
16	Tugu	1,99	20,31	1.290,71	1.313,01	Tinggi	
	Total	185,45	736,37	3.762,89	4.684,70	Tinggi	

Sumber: Hasil Analisis,2023

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah dengan potensi bahaya banjir rob terluas, yakni sebesar 1.313,01 hektare dan termasuk dalam kategori kelas bahaya tinggi. Sebaliknya, Kecamatan Pedurungan memiliki potensi luas bahaya banjir rob paling kecil, yaitu sebesar 0,7 hektare yang diklasifikasikan dalam kelas bahaya rendah. Selain itu, terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki potensi bahaya banjir rob (kelas bahaya 0), yaitu Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Gunungpati, Mijen,

Ngaliyan, Semarang Selatan, dan Tembalang. Berdasarkan hasil analisis terhadap distribusi luas potensi serta klasifikasi tingkat bahaya pada tingkat kecamatan, dapat disimpulkan bahwa secara agregat Kota Semarang termasuk dalam kategori kelas bahaya banjir rob tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman banjir rob merupakan salah satu risiko dominan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di wilayah pesisir Kota Semarang.

Tabel 1. 5 Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Bencana Banjir Rob di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan(Jiwa)			Kelas Kerentanan Sosial
			Penduduk Disabilitas	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan	
1	Banyumanik	-	-	-	-	Rendah
2	Candisari	-	-	-	-	Rendah
3	Gajah Mungkur	-	-	-	-	Rendah
4	Gayamsari	30.817,29	31,48	3.954,69	3.946,98	Sedang
5	Genuk	32.556,81	32,86	2.207,86	3.998,96	Rendah
6	Gunung Pati	-	-	-	-	Rendah
7	Mijen	-	-	-	-	Rendah
8	Ngaliyan	-	-	-	-	Rendah
9	Pedurungan	11,90	0,01	0,57	1,47	Rendah
10	Semarang Barat	7.473,14	7,71	554,28	939,27	Rendah
11	Semarang Selatan	-	-	-	-	Rendah
12	Semarang Tengah	12.492,80	18,25	1.530,17	2.099,36	Rendah
13	Semarang Timur	52.043,18	94,64	4.819,44	8.142,53	Tinggi
14	Semarang Utara	99.641,72	103,74	11.422,71	13.504,65	Tinggi
15	Tembalang	-	-	-	-	Rendah
16	Tugu	17.389,55	21,76	1.410,49	1.860,73	Sedang
Total		252.426,38	310,45	25.900,20	34.493,95	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan terhadap bencana banjir rob di Kota Semarang, tercatat bahwa total jumlah penduduk yang berpotensi terdampak mencapai 252.426,38 jiwa.

Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi, yaitu sebesar 99.641,72 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah penduduk terpapar paling rendah, yakni sebesar 11,90 jiwa.

Dalam analisis ini, kelompok rentan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penyandang disabilitas, penduduk miskin, dan kelompok umur rentan. Berdasarkan distribusi potensi kelompok rentan, Kecamatan Semarang Utara menunjukkan angka tertinggi pada seluruh kategori, dengan jumlah 13.504,65 jiwa kelompok umur rentan, 11.422,71 jiwa penduduk miskin, serta 103,74 jiwa penyandang disabilitas. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kecamatan Semarang Utara memiliki tingkat kerentanan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya dalam konteks paparan banjir rob, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi dan strategi penanggulangan bencana yang berbasis pada perlindungan kelompok rentan.

Upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang sendiri dilakukan melalui pembentukan kerangka hukum daerah yang kuat, salah satunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan ini menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan tata kelola kebencanaan di tingkat lokal, mengatur seluruh fase manajemen bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana dengan tugas dan kewenangan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara substansial, perda ini mensinergikan prinsip-prinsip mitigasi risiko dan perlindungan terhadap masyarakat melalui penetapan kebijakan yang bersifat preventif dan responsif,

termasuk kewajiban penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan turunan operasional dari perda sehingga mekanisme pengendalian risiko banjir dapat dilakukan secara berjenjang dan sistematis.

Dalam implementasinya, aspek teknis penanggulangan bencana juga diatur melalui perangkat regulasi turunan peraturan wali kota yang menguatkan struktur kelembagaan dan sistem penanganan bencana. Misalnya, Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 yang mengatur sistem informasi penanggulangan bencana, termasuk pengelolaan data dan informasi bencana, serta mekanisme penyampaian informasi kepada publik secara akurat dan tepat waktu, merupakan bagian penting dalam menciptakan kesiapsiagaan daerah menghadapi kejadian banjir. Regulasi teknis ini memperkuat implementasi perda dengan menyediakan instrumen administrasi yang diperlukan untuk mendukung koordinasi antarinstansi dan memastikan respons terhadap potensi banjir berjalan efektif. Selain itu, Perwal juga mengatur struktur organisasi dan fungsi BPBD sehingga tugas pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan setelah kejadian banjir dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan jelas dalam kerangka pemerintahan kota.

Integrasi regulasi tersebut juga ditandai dengan penerbitan keputusan wali kota yang mengatur status kebencanaan dalam situasi tertentu, seperti penetapan status siaga atau status tanggap darurat bencana banjir, yang memberikan dasar hukum pelaksanaan tindakan cepat dalam kondisi kritis. Kebijakan ini mencerminkan dinamika hukum administratif yang responsif terhadap fenomena hidrometeorologi Kota Semarang, yaitu tingginya curah hujan dan kerentanan geografis yang memicu banjir rob maupun banjir akibat hujan intensif. Secara

makro, keberadaan perda, perwal, dan keputusan wali kota ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam merespon tantangan bencana banjir secara legalistik dan praktis, dengan tujuan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi daerah serta meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh kejadian banjir.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen hukum fundamental yang memberikan kerangka kelembagaan resmi bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah, termasuk di antaranya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana seperti banjir yang kerap terjadi di wilayah kecamatan Gayamsari, Tugu, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk.

Perda ini secara eksplisit mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD Kota Semarang, sebagai perangkat daerah yang mempunyai legitimasi dan kewenangan administratif untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana secara sistematis dan terkoordinasi dengan perangkat pemerintahan lain. Dengan adanya perda tersebut, BPBD dibekali landasan normatif untuk melakukan koordinasi lintas sektor, menyusun rencana kontinjensi bencana, serta mengelola sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam menghadapi ancaman banjir dan risiko bencana lainnya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas adaptif daerah dalam konteks manajemen risiko bencana yang komprehensif.

George Edward (Tangkilisan, 2003:55-88) berkata bahwa komponen sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. ketersediaan Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan dan pencegahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum memadai dan kurang jumlahnya. Sumber daya finansial berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan yang akan diimplementasikan tidak akan bisa berjalan terlaksananya²

Menurut Edward (Winarno,2007:3) ada dua karakteristik kurikulum 2013 utama dari birokrasi, yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi. BPBD Kota Semarang khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan belum memiliki SOP, namun hal tersebut bisa dikendalikan. Selanjutnya penyebaran tanggung jawab BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan dan pencegahan dalam implementasi kebijakan telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antara pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota Semarang. Pembagian tugas antara bidang kesiapsiagaan dan pencegahan secara jelas telah diatur dalam peraturan walikota Semarang nomor 39 tahun 2010 pasal 16 - 20 tentang penjabaran tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah Kota Semarang.³

² Agustiningasih Dwi dan Marom AUFARUL. (2019). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana"

³ Winarno, Budi. (2007). "Kebijakan Publik teori dan proses". Jakarta : PT Bukukita.

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti memiliki ketertarikan dan keingintahuan untuk melakukan penelitian mengenai pengimplementasian BPBD Kota Semarang di daerah kecamatan Gayamsari, Tugu, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk selama keberjalanannya karena berdasarkan data di atas menunjukkan kerentanan banjir dan banjir rob masing berada di kelas yang tinggi. Peneliti akan menggunakan landasan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 mengenai kebijakan penanggulangan bencana yang berfokus pada prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Selain itu, pembahasan yang mendalam ini juga diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk melihat titik kekurangan dari kebijakan penanggulangan bencana dan praktik yang lebih berkelanjutan dalam tanggap darurat dari ancaman bencana. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan evaluasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 mengenai kebijakan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan bencana banjir & banjir rob di daerah Kecamatan Gayamsari, Tugu, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk pada tahun 2025?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BPBD Kota Semarang dalam mengatasi banjir & banjir rob di daerah Kecamatan

Gayamsari, Tugu, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk pada tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah menganalisis kekurangan dan kelebihan dari kebijakan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang sudah dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kota Semarang. Fokus utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data kualitatif kepada kecamatan yang masih memiliki kerentanan tinggi terkait bencana banjir dan banjir rob tentang keefektifan dan keefisienan dari penerapan yang sudah dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam pandangan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kasus bencana yang menimpa masyarakat, terutama pada upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan penerapan badan penanggulangan bencana daerah Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dalam studi ilmu pemerintahan, sosial dan politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai kebijakan publik. Lebih khususnya, keberadaan penelitian

ini dapat dimungkinkan adanya wawasan baru yang akan diperoleh dalam peran pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem badan penanggulangan bencana daerah yang baik dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1	Dio Mahardika ; Endang Larasati Setianingsih (2018), Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus pada manajemen strategi Ramli (2010) Prabencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana.	Mengkaji efektivitas manajemen bencana banjir oleh BPBD Kota Semarang berdasarkan 3 tahap utama yaitu prabencana, saat bencana dan pascabencana.	Peneliti menunjukkan bahwa pada tahap prabencana, BPBD belum menyusun rencana kontinjensi yang memadai, yang mengindikasikan kurangnya kesiapan dalam menghadapi potensi banjir. Pada tahap saat bencana, ditemukan kekurangan dalam hal logistik dan personel tanggap darurat, yang menghambat respons cepat dan efektif terhadap kejadian banjir. Sementara itu, pada tahap pascabencana, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BPBD dinilai kurang tepat sasaran, sehingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak tidak optimal. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam perencanaan kontinjensi, penguatan kapasitas logistik dan sumber daya manusia, serta evaluasi menyeluruh terhadap program rehabilitasi pascabencana untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Kota Semarang.

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
2	Shabrina Alifah Pinasti , Aulia Yudatining Ummi , Afifah Khoirunisa Azzahro dan Ubaidillah Kamal (2024), Penanganan Banjir di Kota Semarang Guna Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Teori Welfare State.	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.	Menyoroti pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan lingkungan hidup dalam konteks penanganan banjir Kota Semarang dianalisis sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.	Peneliti menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan banjir, seperti pembangunan infrastruktur dan normalisasi sungai, namun pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip welfare state. Kurangnya integrasi antara kebijakan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana menyebabkan upaya yang dilakukan belum optimal dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
3	Suharto dan Andre Setiawan (2022), Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus	Metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan melukiskan	Mengetahui implementasi dari Pembangunan Automatic Water Level Recorder (AWRL) dan	Peneliti menunjukkan bahwa dalam tahap prabencana, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD Kota Semarang Tahun 2020)	suatu keadaan atas fakta-fakta yang ada, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi , dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.	Automatic Rainwater Recorder (ARR) di Kelurahan Wates dan alat pemantau ketinggian air hujan konvensional di Kelurahan Wonosari cukup mampu untuk membangun komunikasi antar lembaga kebencanaan di 7 kelurahan di DAS Beringin.	Pada tahap tanggap darurat, BPBD menjalankan operasi piket 24 jam untuk merespons laporan masyarakat secara cepat. Kendati demikian, keterbatasan personil dan peralatan masih menjadi kendala dalam penanganan bencana secara optimal. Dalam tahap pascabencana, BPBD berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana, yang bertujuan untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas relawan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai. Namun, koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas penanggulangan bencana.

Menurut penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian tentang banjir di Kota Semarang berkonsentrasi pada manajemen bencana, efektivitas program penanggulangan bencana, dan kajian normatif kebijakan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana BPBD Kota Semarang, sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menangani banjir rob dan penanggulangan bencana, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peratu. Dibandingkan dengan menilai kinerja organisasi dari sudut pandang pencapaian target program, penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana BPBD menerapkan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Selain itu, penelitian ini memeriksa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif kapasitas kelembagaan dan tata kelola kebencanaan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Penanggulangan Bencana David E. Alexander

David E. Alexander (2002) pernah menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada perencanaan strategi yang menyeluruh dan pendekatan ilmiah. Alexander percaya bahwa bencana adalah hasil dari akumulasi risiko yang tidak dikelola dalam sistem sosial dan lingkungan daripada peristiwa yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Alexander menekankan bahwa penanggulangan bencana yang efektif memerlukan kombinasi antara pendekatan teknis, tata kelola yang baik, dan partisipasi dalam semua tahap penanggulangan

bencana masyarakat, mulai dari mitigasi dan kesimpulan, hingga pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap ancaman dan pelestarian lingkungan.

1.6.2 Teori Penanggulangan Bencana Tierney

Menurut Tierney (2007). Penanggulangan bencana merupakan komponen penting dari manajemen risiko. Penanggulangan bencana mencakup tindakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Tierney menekankan bahwa bencana tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga karena keterhubungan antara bahaya yang terjadi dan kemampuan masyarakat yang lemah untuk menghadapinya. Akibatnya, penanggulangan bencana tidak dapat dilihat hanya sebagai tindakan reaktif; sebaliknya, hal itu harus dipandang sebagai proses yang terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi tiga kategori: bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam termasuk banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami yang disebabkan oleh fenomena alam. Sementara itu, bencana nonalam terjadi karena masalah nonalam seperti kegagalan teknologi dan epidemi. Bencana sosial terjadi karena konflik sosial atau kerusuhan antar kelompok masyarakat.⁴ Alexander (2002) menyatakan bahwa bencana adalah akumulasi dari berbagai

⁴ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

ancaman yang tidak dikelola dengan baik oleh sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan, bukan sekadar kejadian alam yang terjadi secara tiba-tiba. Bencana adalah hasil dari hubungan antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kerentanan dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi ancaman, semakin besar kemungkinan bencana dan konsekuensi yang ditimbulkannya.⁵

Selain teori penanggulangan bencana, penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan analisis mengenai peran BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan banjir dan banjir rob. Penggunaan ketiga teori tersebut didasarkan pada kenyataan empiris bahwa masalah penanggulangan banjir di Kota Semarang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kebencanaan, tetapi juga berkaitan dengan kemajuan dan kapasitas kelembagaan.

1.6.3 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III (1980) mengatakan implementasi kebijakan adalah proses mengubah tujuan kebijakan menjadi tindakan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana. Empat faktor utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan koordinasi BPBD dengan pemerintah kecamatan, OPD, TNI, Polri, dan masyarakat dalam penanggulangan banjir dan banjir rob. Sumber daya berkaitan dengan jumlah personel, anggaran,

⁵ BNPB. (2017). Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.

logistik, dan sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki BPBD. Disposisi menunjukkan komitmen dan responsivitas aparatur dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menjelaskan mengapa tugas dan fungsi BPBD berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Manajemen bencana merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan. Coppola (2015) mendefinisikan manajemen bencana sebagai upaya yang melibatkan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, serta pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai aktor. Pendapat tersebut sejalan dengan Carter (2008) yang menyatakan bahwa manajemen bencana adalah proses pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab organisasi dalam rangka menangani seluruh aspek kedaruratan, khususnya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tiga tahapan utama digunakan dalam manajemen bencana di Indonesia: prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Tahap prabencana terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Tahap tanggap darurat berkonsentrasi pada penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan. Tahap pascabencana berfokus pada rehabilitasi dan

rekonstruksi untuk memulihkan infrastruktur, sosial, dan sosial masyarakat.⁶ Oleh karena itu, manajemen bencana menekankan betapa pentingnya melakukan upaya pencegahan dan membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi bencana, bukan hanya menjadi reaktif ketika bencana terjadi.

1.6.4 Teori Tata Kelola Bencana Tierney

Tata kelola bencana, atau tata kelola bencana, adalah pendekatan yang menekankan betapa pentingnya bahwa berbagai pihak berpartisipasi dalam penanggulangan bencana melalui prinsip seperti koordinasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Tierney (2012) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah pusat atau lembaga kebencanaan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana; kemampuan pemerintah lokal juga mempengaruhi seberapa baik mereka berkolaborasi dengan organisasi swasta, publik, dan sosial.

Pemerintah kecamatan berfungsi sebagai perangkat pemerintahan daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kota dan kelurahan serta komunitas lokal. Mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap bencana, menyebarkan informasi tentang kebencanaan, memobilisasi sumber daya lokal, mengatur prosedur evakuasi, dan membantu menyediakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak adalah semua tanggung jawab pemerintah kecamatan. Melalui pelatihan, simulasi kebencanaan, dan pembentukan komunitas tangguh bencana, pemerintah kecamatan juga memainkan

⁶ BNPB. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Karena masalah banjir yang kompleks memerlukan koordinasi lintas sektor dan pendekatan berbasis kewilayahan, keterlibatan pemerintah kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan BPBD diterapkan dengan baik di Kota Semarang. Akibatnya, tata kelola bencana yang efektif di tingkat kecamatan akan meningkatkan kemampuan adaptasi daerah dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.⁷⁸

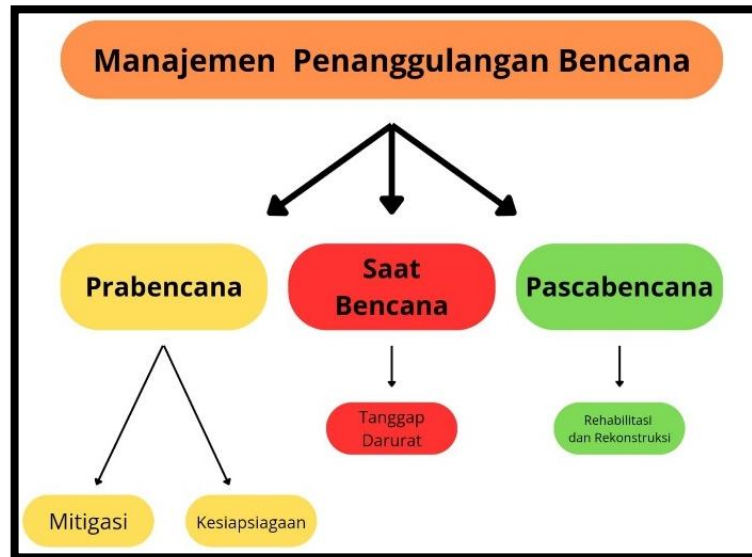
1.6.5 Teori Kapasitas Kelembagaan Grindle

Teori kapasitas kelembagaan Grindle (1997) digunakan dalam penelitian ini selain implementasi kebijakan. Kapasitas kelembagaan meliputi kapasitas sistem kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas organisasi, serta kemampuan organisasi untuk melaksanakan fungsi, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan, menurut Grindle. Kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk keberhasilan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan BPBD, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah personel yang terbatas, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya koordinasi antarlembaga.

⁷ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

⁸ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

1.6.6 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1. 1 Kerangka Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sumber: BPBD (2025)

Pada kerangka penanggulangan bencana di Indonesia di atas memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah, yang mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam, non-alam, dan sosial. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Secara konseptual, penanggulangan bencana dilaksanakan dalam suatu siklus yang berkesinambungan yang terdiri atas tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta sistem peringatan dini yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pada tahap tanggap darurat, dilakukan upaya respons cepat berupa penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, tahap pasca bencana mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang diarahkan pada pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung oleh tiga tahapan utama, yaitu prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Prabencana bencana berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengendalian potensi risiko melalui kebijakan tata ruang, edukasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Saat bencana menitikberatkan pada efektivitas respons saat bencana terjadi melalui koordinasi lintas sektor dan mobilisasi sumber daya. Adapun pascabencana berorientasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat secara optimal. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, penanggulangan bencana diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat serta menjaga stabilitas pembangunan nasional.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah satu langkah dalam penelitian. Ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan penelitian ke dalam konsep yang memiliki indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Penelitian ini berfokus pada manajemen bencana setiap tahapan prabencana, tanggap darurat (saat bencana) dan pascabencana dalam mengatasi banjir. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan untuk memastikan bahwa tindakan penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur dan efektif di lapangan,

Tabel 1. 7 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Faktor	Indikator
Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya sistematis dan terintegrasi dalam rangka mengurangi risiko serta dampak bencana melalui tahapan prabencana, saat bencana dan pascabencana.	Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan regulasi penanggulangan bencana. - Penyusunan peta risiko bencana. - Pelaksanaan program pengurangan risiko bencana. - Pembangunan infrastruktur pengendali bencana.
	Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelatihan dan simulasi bencana - Keberadaan sistem peringatan dini - Kesiapan sumber daya manusia - Ketersediaan logistik dan rencana evakuasi
	Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan respons terhadap kejadian bencana - Efektivitas koordinasi antarinstansi - Ketepatan distribusi bantuan - Ketersediaan posko dan layanan darurat
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan infrastruktur - Pemulihan layanan public - Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat - Keberlanjutan program pascabencana

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini menunjukkan hubungan antara peneliti dengan informan serta fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari program, kejadian, aktivitas, proses, satu atau lebih pihak yang dianggap berhubungan dengan masalah penanggulangan bencana di Semarang. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi detail. Selain itu, informasi yang telah dikumpulkan dapat menjadi bagian penting dari penyelidikan yang telah dilakukan dengan mengungkap kasus tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peneliti gambaran tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang menangani masalah penanggulangan banjir dan mendeskripsikan berbagai konsep yang terkait dengan masalah tersebut. ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Semarang dalam penanggulangan bencana digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan menerapkan

metodologi kualitatif. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan yang diteliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang relevan. Untuk menjamin validitas dan relevansi hasil penelitian, lokasi penelitian yang tepat sangat penting. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu:

1. Kantor BPBD Kota Semarang
2. Kecamatan Gayamsari
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Semarang Timur
5. Kecamatan Semarang Barat
6. Kecamatan Semarang Utara
7. Kecamatan Genuk

1.8.3 Subjek Penelitian

(Creswell, 2010) subjek penelitian adalah pihak yang memberikan informasi atau data yang relevan sesuai fokus studi, sehingga dalam konteks penanggulangan bencana, subjek tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, masyarakat terdampak, aparat pemerintah lokal, hingga lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang kebencanaan. (Miles & Huberman, 1992) menekankan pentingnya memilih subjek yang mengalami atau memiliki pengetahuan langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk memperoleh

data yang kaya dan bermakna. Oleh karena itu, pemilihan subjek dalam penelitian kebijakan penanggulangan bencana, peneliti memilih peran dan pengalaman mereka dalam peristiwa kebencanaan, agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi di lapangan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih efektif ke depannya, informan yang dimaksud antara lain mencakup:

1. Staf Bidang 1, Bidang 2 dan Bidang 3 Kantor BPBD Kota Semarang
2. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Gayamsari
3. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Tugu
4. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Semarang Timur
5. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Semarang Barat
6. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Semarang Utara
7. Kasi Trantib Kantor Kecamatan Genuk

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, penelitian ini menggunakan pemahaman dari teori manajemen bencana, diperlukan pengumpulan data kualitatif untuk menganalisis empat variabel utama: Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Dengan dilakukannya penelitian ini, besar harapan peneliti agar analisis implementasi kebijakan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana Kota Semarang.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data utama penelitian adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari pengamatan atau wawancara di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data primer pertama digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam pencarian dan pencatatan sumber data dalam hal ini melibatkan peneliti secara langsung dan melakukan penggalan informasi dari pegawai BPBD Kota Semarang serta pegawai kecamatan dan kedua adalah data sekunder, yang berasal dari perantara. Data sekunder juga disebut sebagai data pendukung, dan berasal dari sumber pertama, seperti buku kesiapsiagaan bencana yang berkaitan dengan penanggulangan atau mitigasi kebencanaan, dan Jurnal sehingga nantinya dapat diperoleh data dan informasi yang valid mengenai proses penyelenggaraan penelitian Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 terkait tujuan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana Kota Semarang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis penanggulangan bencana karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pemahaman, dan respon para pelaku serta korban terhadap bencana. Pendekatan kualitatif menekankan pada proses, makna, dan konteks sosial di balik tindakan-tindakan yang diambil dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya tertarik pada angka atau statistik, tetapi juga ingin memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat berinteraksi, membuat keputusan,

dan merespon situasi kritis. Adapun dalam penelitian kualitatif ini, beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti (Huberman & Miles, 1992).⁹ Dalam metode kualitatif, peneliti akan mewawancarai pegawai BPBD Kota Semarang, serta pegawai kecamatan dari daerah Gayamsari, Tugu, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk. Wawancara akan dilakukan kepada 10 (sepuluh) narasumber secara terstruktur dan juga berkala. Artinya, wawancara dapat dilakukan lebih dari satu kali guna mendapatkan banyak informasi yang mendukung penelitian.

2. Observasi

Observasi partisipatif merupakan teknik penting dalam pengumpulan data kualitatif pada studi penanggulangan bencana. Dengan observasi, peneliti dapat melihat langsung bagaimana aktivitas tanggap darurat, evakuasi, distribusi bantuan, hingga proses pemulihan pasca-bencana berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap aspek-aspek non-verbal seperti pola komunikasi, koordinasi antar lembaga, serta kendala teknis yang tidak selalu bisa dijelaskan secara verbal oleh

⁹ Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47

pelaku. Observasi juga membantu membangun pemahaman kontekstual yang lebih utuh tentang dinamika sosial yang muncul selama dan setelah bencana.

3. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data berupa studi Pustaka hadir untuk melengkapi sumber data yang sudah pernah diteliti sebelumnya dan dapat dijadikan sumber literatur dalam penelitian. Pada penelitian yang berbasis pendekatan studi kasus, Teknik studi Pustaka digunakan untuk mengetahui kasus-kasus serupa dengan penelitian. Apabila ditemukan kesamaan maka akan sangat membantu penelitian ini berjalan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik lain yang tak kalah penting. Dokumen yang dimaksud bisa berupa laporan kebijakan, data kebencanaan, protokol evakuasi, peraturan daerah, atau media berita yang berkaitan dengan peristiwa bencana. Data dokumenter ini dapat digunakan untuk memperkuat informasi dari wawancara dan observasi, serta memberikan latar belakang historis atau kebijakan yang mendasari tindakan-tindakan tertentu dalam penanggulangan bencana. Dengan menganalisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian akan melibatkan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang dalam proses pengumpulan data, jadi ada langkah-langkah yang harus diambil untuk menilai apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian atau tidak. Setelah data dikumpulkan, pengerjaan analisis data akan memudahkan pengolahan data penulis karena Proses analisis data termasuk membuat ringkasan dan memahami pola.

Hasil dari penelitian yang berupa wawancara dan dokumen dari penelitian selanjutnya direduksi. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.¹⁰ Adapun penyajian data dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan

¹⁰ Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.